

Sosiologi Politik, Peran Anggaran Pemerintah dalam Pengembangan Daerah Pesisir

Political Sociology, the Role of Government Budgets in the Development of Coastal Areas

Aji Sofyan Effendi¹, Risma Abriani², Muhammad Ikbal³✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: muhammad.ikbal@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini mendalami peran sosiologi politik dalam konteks kebijakan anggaran pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang muncul akibat alokasi anggaran yang tidak merata. Desain penelitian ini Studi ini merupakan penelitian literatur yang mendalam tentang kebijakan politik anggaran yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Muara Badak. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi pesisir, implementasi kebijakan anggaran yang cerdas dan terencana di Kecamatan Muara Badak memberikan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas lokal, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan, menciptakan peluang kerja, dan mempromosikan pariwisata yang ramah lingkungan. Pengawasan yang ketat, investasi dalam pendidikan, dan adopsi teknologi berwawasan lingkungan menjadi kunci untuk menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang ada.

Abstract

The purpose of this research is to explore the role of political sociology in the context of government budget policies aimed at overcoming economic and social inequalities that arise due to unequal budget allocation. This study is an in-depth literature research on budget political policies that focus on the empowerment of coastal communities in Muara Badak District. The findings show that in the context of coastal economic development, the implementation of smart and planned budget policies in Muara Badak District provides a solid foundation for sustainable economic growth. With a focus on the sustainable use of natural resources and the empowerment of local communities, the government has taken steps that are able to increase fishermen's incomes, create job opportunities, and promote environmentally friendly tourism. Strict supervision, investment in education, and adoption of environmentally sound technologies are key to avoiding overexploitation of existing natural resources.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Aji Sofyan Effendi, Risma Abriani, Muhammad Ikbal.

Article history

Received 2023-11-20

Accepted 2024-01-15

Published 2024-01-30

Kata kunci

Sosiologi Politik;
Kebijakan Anggaran;
Pemberdayaan
Masyarakat.

Keywords

Political Sociology;
Budget Policies;
Community
Empowerment.

1. Pendahuluan

Konteks ekonomi pesisir di Muara Badak mencerminkan realitas kompleks yang melibatkan interaksi antara manusia, alam, dan kebijakan pemerintah. Terletak di tepi pantai, Muara Badak adalah sebuah daerah yang diberkahi dengan sumber daya alam melimpah, mulai dari kekayaan biota laut hingga potensi pariwisata yang menakjubkan. Namun, di balik pesonanya, terdapat isu-isu permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Muara Badak adalah ketidakstabilan ekonomi. Meskipun memiliki potensi besar, penduduk lokal sering kali menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Faktor-faktor seperti overfishing, degradasi lingkungan, dan kurangnya infrastruktur yang memadai telah menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah terkait eksploitasi sumber daya alam juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan masyarakat pesisir.

Selain masalah ekonomi, aspek sosial juga menjadi perhatian utama. Kemiskinan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta minimnya peluang pekerjaan yang layak adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk pesisir Muara Badak. Selain itu, pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang tidak terkendali telah menimbulkan tekanan tambahan pada infrastruktur dan sumber daya alam (Sinta, & Fahrati, 2022). Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran kebijakan anggaran pemerintah dalam memperdayakan ekonomi pesisir di Muara Badak. Dengan memahami isu-isu kompleks ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan anggaran pemerintah dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Sosiologi politik dalam konteks kebijakan anggaran pemerintah membuka pintu untuk memahami dinamika kompleks yang terjadi dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat sosial dan politik. Di tengah arus globalisasi, revolusi teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, kebijakan anggaran pemerintah menjadi sangat penting dalam membimbing pertumbuhan ekonomi dan memastikan keadilan sosial. Namun, fenomena yang seringkali muncul adalah ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran, di mana beberapa sektor mendapatkan perhatian lebih dibandingkan yang lain.

Isu permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Banyak negara menghadapi kesenjangan ekonomi yang tajam, di mana sebagian kecil dari populasi mendapatkan manfaat ekonomi yang berlimpah sementara sebagian besar masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan akses terbatas terhadap layanan sosial dasar. Selain itu, kebijakan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat juga dapat memperburuk ketidaksetaraan gender, membatasi akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan distorsi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di samping itu, dalam era informasi ini, transparansi dan akuntabilitas kebijakan anggaran juga menjadi isu kritis. Kurangnya transparansi dalam proses penyusunan anggaran pemerintah dapat menciptakan ruang untuk korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, memahami bagaimana sosiologi politik mempengaruhi proses pembentukan dan implementasi kebijakan anggaran pemerintah adalah esensial. Penelitian dalam bidang ini memainkan peran kunci dalam merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi isu-isu ini, menciptakan kebijakan anggaran yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendalami peran sosiologi politik dalam konteks kebijakan anggaran pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang muncul akibat alokasi anggaran yang tidak merata. Dalam menghadapi fenomena ketidakseimbangan alokasi anggaran, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan anggaran, dan sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Memberikan Rekomendasi Kebijakan yang Berbasis Bukti: Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris. Rekomendasi ini akan

dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah yang lebih bijaksana dan menciptakan kebijakan anggaran yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata.

2. Metode

2.1. Desain Penelitian

Studi ini merupakan penelitian literatur yang mendalam tentang kebijakan politik anggaran yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Muara Badak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif aspek-aspek kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka. Dalam konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi berbagai program dan inisiatif yang diimplementasikan dalam anggaran, mengevaluasi dampaknya, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya. Hasil studi ini diharapkan akan memberikan wawasan yang mendalam dan berharga bagi pemangku kebijakan, peneliti, dan masyarakat pesisir untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Profil Ekonomi Pesisir di Muara Badak

Muara Badak merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam (migas) di Kutai Kartanegara yang eksplorasi dan eksploitasinya saat ini dikerjakan oleh PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) Diarsipkan 2021-06-24 di Wayback Machine. yang didirikan sejak 27 Juli 2017, setelah sebelumnya dijalankan oleh perusahaan migas multinasional asal Amerika Serikat, VICO Indonesia. Namun tidak mengalami pembangunan yang layak dari Pemerintah kabupaten. Padahal eksplorasi ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Dibutuhkan peran serta pemerintah untuk merealisasikan kecamatan ini menjadi salah satu sumber objek wisata yang menjanjikan. Apabila kita melihat kondisi Muara Badak saat ini, sangat disesalkan apabila disebut sebagai salah satu kabupaten terkaya di Indonesia (Tabita, dkk.,2023).

3.1.2. Kebijakan Anggaran Pemerintah Terkait

Analisis kebijakan anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintah kecamatan Muara Badak mencerminkan tekad yang kuat untuk memajukan dan memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Kebijakan ini mengakui pentingnya mendukung sektor-sektor utama dalam perekonomian lokal, khususnya masyarakat nelayan dan industri pariwisata pantai. Dalam upayanya untuk mencapai tujuan ini, pemerintah kecamatan telah merancang alokasi anggaran yang bijaksana dan terencana.

Penting untuk memahami bahwa kehidupan ekonomi masyarakat pesisir sering kali berkaitan erat dengan keberlanjutan sumber daya alam, terutama bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. Oleh karena itu, kebijakan anggaran tersebut mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, memastikan bahwa para nelayan memiliki akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya tersebut. Upaya ini mencakup pendekatan edukasi untuk memperkenalkan praktik-praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta memperkuat infrastruktur lokal yang mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan, seperti fasilitas penanganan ikan yang modern dan penyediaan akses pasar yang lebih baik.

Sementara itu, sektor pariwisata pantai menjadi salah satu potensi besar dalam meningkatkan perekonomian di Muara Badak. Dengan keindahan alamnya yang memukau, kebijakan anggaran telah dialokasikan untuk pengembangan fasilitas pariwisata, seperti pengembangan pantai yang bersih dan nyaman, pembangunan tempat wisata, serta penyediaan infrastruktur pendukung, termasuk jalan dan transportasi umum yang memadai. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga diterapkan dalam menggandeng masyarakat setempat untuk mengelola destinasi pariwisata,

menciptakan lapangan pekerjaan lokal, dan memperkenalkan wisata budaya yang memperkaya pengalaman wisatawan (Oktavianus, 2014).

Melalui kebijakan anggaran ini, pemerintah kecamatan Muara Badak bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memberdayakan masyarakat nelayan dan industri pariwisata pantai, kebijakan ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah kecamatan Muara Badak berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sambil menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.

3.1.3. Dampak Kebijakan Anggaran Pemerintah

Evaluasi dampak positif dan negatif kebijakan anggaran terhadap ekonomi pesisir merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Dalam konteks ekonomi pesisir, di mana kehidupan ribuan orang tergantung pada sektor nelayan dan pariwisata pantai, kebijakan anggaran memiliki peran krusial dalam membentuk arah pembangunan ekonomi lokal. Dalam mengkaji dampak positif, penting untuk mencatat bahwa alokasi dana yang cerdas dapat menghasilkan sejumlah perubahan yang signifikan. Pertama, pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam sektor perikanan, bisa ditingkatkan melalui investasi dalam pendidikan nelayan, teknologi, dan pengawasan ketat. Dengan cara ini, hasil tangkapan nelayan bisa ditingkatkan secara berkelanjutan, mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan pendapatan nelayan.

Selain itu, alokasi anggaran yang cerdas juga dapat diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata pantai. Infrastruktur pariwisata yang memadai dan atraktif, seperti pantai yang bersih, akomodasi yang nyaman, dan fasilitas umum yang baik, mampu menarik wisatawan, menciptakan lapangan pekerjaan lokal, dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal, daerah pesisir dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan, memberdayakan komunitas setempat, dan memperkenalkan keindahan alam mereka kepada dunia.

Namun, sisi negatif kebijakan anggaran juga harus dievaluasi dengan cermat. Salah satu risiko utama adalah adanya potensi eksploitasi sumber daya alam. Jika alokasi anggaran tidak diawasi dengan ketat, ada kemungkinan terjadinya overfishing dan kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem laut dan menciptakan ketidakstabilan jangka panjang bagi nelayan dan komunitas pesisir. Selain itu, peningkatan pariwisata juga dapat menghadirkan masalah seperti over-tourism, yang dapat merusak lingkungan, keberlanjutan budaya, dan kenyamanan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan anggaran harus dilakukan secara holistik, melibatkan pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan ahli lingkungan. Dengan pendekatan ini, dapat diidentifikasi dampak positif yang dapat ditingkatkan dan dampak negatif yang perlu diminimalisir. Melalui evaluasi yang teliti dan berkelanjutan, kebijakan anggaran dapat disempurnakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Merdeka, 2023).

3.2. Pembahasan

Berdasarkan argumen di atas, kebijakan anggaran yang bijaksana dan terencana telah menjadi langkah positif bagi pemerintah kecamatan Muara Badak dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, ada beberapa permasalahan yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi lokal. Salah satu solusi penting adalah penguatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat dan melibatkan masyarakat lokal serta nelayan dalam proses keputusan, potensi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Pendidikan nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan juga perlu ditingkatkan, memastikan bahwa mereka memahami pentingnya keberlanjutan sumber daya laut.

Selain itu, perlu ada investasi dalam riset dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, seperti metode penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan dalam industri pariwisata. Ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dalam bidang teknologi dan penelitian. Pemberdayaan masyarakat lokal juga harus menjadi fokus utama. Program pelatihan dan pendidikan untuk membantu mereka memahami potensi pariwisata dan bagaimana memanfaatkannya secara berkelanjutan sangat penting. Dukungan dalam bentuk akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi produk lokal juga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan (Noor, 2011).

Selain itu, penting untuk mengembangkan kebijakan regulasi yang mengatur pertumbuhan pariwisata. Pengelolaan kunjungan wisatawan melalui kuota, regulasi pembangunan di area pesisir, dan pemantauan dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya lokal adalah langkah-langkah penting. Melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait pariwisata juga dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan sektor swasta sangat penting. Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan ini, kebijakan anggaran dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi kelestarian alam dan budaya lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Muara Badak.

4. Simpulan

Dalam konteks pembangunan ekonomi pesisir, kebijakan anggaran yang bijaksana dan terencana di kecamatan Muara Badak memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal, pemerintah telah menciptakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkenalkan pariwisata yang bertanggung jawab secara lingkungan. Pengawasan ketat, pendidikan, dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan adalah kunci untuk mengatasi potensi eksploitasi sumber daya alam.

Pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan, menciptakan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan memungkinkan mereka memanfaatkan potensi pariwisata secara bertanggung jawab. Pengaturan regulasi pariwisata yang bijaksana dan partisipasi komunitas dalam proses keputusan juga mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan sektor swasta merupakan landasan untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan pendekatan ini, Muara Badak dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sambil mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal.

Daftar Pustaka

- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589-1602.
- Farhas, R. J., & Riyanti, R. (2022). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 758-771.
- Gani, N. A., Priharta, A., & Purnamasari, A. (2022). Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Turnover Intention pada Perusahaan Tambang di Kalimantan. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2), 579-588.
- Gunawan, G., Jufri, A. W., Sedijani, P., Hadiprayitno, G., & Bachtiar, I. (2019). Pelatihan Penulisan Pada Jurnal Internasional Bagi Dosen Dan Mahasiswa Magister Pendidikan IPA Unram. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4).

- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 144-151.
- Hidayat, S. (2016). Strategi Pengembangan Ekowisata di Desa Kinarum Kabupaten Tabalong. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(3), 282-292.
- Iriyena, P., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2019). Analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Kusumawardana, A. S., & Dintarini, M. (2021). Analisis interpretasi matematis dalam mini riset mahasiswa melalui pembelajaran berbasis riset. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 7(1), 102-114.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Nursafira, A. (2023). Dampak Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Secara Intensif bagi Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 3(4), 327-333.
- Putri, T. T. A. (2017). Pengelolaan sumberdaya lahan gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat menuju lahan tanpa bakar. *Jurnal Penelitian Agrosamudra*, 4(2), 92-109.
- Retno, E. K. (2013). Pengaruh pendidikan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Sinta, S., & Fahrati, E. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1), 81-97.
- Sulastri, U. (2015). Pengaruh Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening (Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 3(2), 1-29.
- Sulistyaningsih, S. (2021). Peningkatan Nilai Tambah Dan Diversifikasi Olahan Rumput Laut. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 186-193.
- Triantoro, D. A. (2019). Konflik sosial dalam komunitas virtual di kalangan remaja. *Jurnal komunikasi*, 13(2), 135-150.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Weningtyas, A., & Widuri, E. (2022). Pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal sebagai modal untuk pembangunan berkelanjutan. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 129-144.
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152-165.
- Wibowo, M. G. (2012). Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan. *Ekbisi*, 7(1)
- Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016).
- Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 2(1).
- Zaluchu, S. E. (2021). Metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan. *Jurnal teologi berita hidup*, 3(2), 249-266.